

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN DAN ISU-ISU GLOBAL

Prof. Wahyudin
FPMIPA UPI Bandung

Secara umum, lapangan pendidikan karakter penuh kontroversi saat perdebatan mempertanyakan apakah fokus darinya pada perbuatan-perbuatan yang dijunjung tinggi (kebijakan), nilai, perilaku, atau kapasitas penalaran. Selain itu, kontroversi juga berpusat di sekitar beragam pendekatan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter: belajar dengan pengalaman, perdebatan rekan sebaya, pengajaran indoktrinatif, pelayanan masyarakat, pengelolaan yang melibatkan partisipan, membaca tentang karakter, dan sebagainya. Banyak dari perdebatan yang ada selama ini berakar pada berbagai perbedaan teoretis dan filosofis. Namun demikian, barangkali jelas bahwa inti dari pendidikan karakter bukanlah perbedaan filosofis, ideologi pedagogis, politik, atau berbagai ketidakselarasan lainnya. Lebih tepatnya, pendidikan karakter adalah tentang perkembangan anak.

A. KARAKTER

Pada penggunaan bahasa sehari-hari, kita menggunakan istilah “karakter” dengan arti ukuran kebaikan seseorang atau keeksentrikan seseorang. Pada kedua kasus tersebut, implikasinya yaitu kita sedang merujuk pada suatu karakteristik yang sudah lama ada dalam diri seseorang itu, meski tidak selalu demikian. Gambaran arti dari “karakter” bahkan lebih tidak jelas lagi saat kita mengkaji bagaimana istilah tersebut digunakan secara teknis. Beberapa orang tidak secara sistematis memperbedakan di antara karakter moral dan karakter nonmoral, sedangkan yang lain-lainnya membatasi definisi-definisi mereka pada domain moral¹ atau secara sistematis memisahkan aspek-aspek moral dari aspek-aspek nonmoral bagi karakter.² Bahkan saat perbedaan-perbedaan dibuat, kriterianya seringkali berbeda; misalnya, Nucci memandang domain moral terdiri atas aspek-aspek universal,³ sedangkan Lickona memperbedakan moralitas universal dan moral nonuniversal.⁴

Bagi sejumlah cara pandang, karakter adalah kepribadian murni, sedangkan bagi yang lainnya karakter terutama bersifat behavioral. Banyak orang meniadakan kefungsi kognitif dari definisi-definisi karakter yang mereka ajukan. Beberapa memberikan definisi-definisi yang komprehensif, sedangkan yang lainnya tidak; beberapa spesifik, yang lainnya lebih cenderung global.

Dokumen pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional (2010), mengajukan suatu definisi karakter sebagai berikut: “Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Sebagai perbandingan, dari lapangan psikologi, M. W. Berkowitz mendefinisikan karakter sebagai: “*an individual’s set of psychological characteristics that affect that*

¹ L. Kohlberg, *The Psychology of Moral Development, Essays on Moral Development, Vol. 2* (New York: Harper and Row, 1984).

² M. W. Berkowitz, “The Complete Moral Person: Anatomy and Formation” dalam J. M. Dubois, ed., *Moral Issues in Psychology: Personalist Contributions to Selected Problems* (Lanham, Md.: University Press of America, 1997): 11-42.

³ L. Nucci, *Education in the Moral Domain* (New York: Praeger, 2001).

⁴ T. Lickona, *Educating for Character* (New York: Bantam, 1991).

person's ability and inclination to function morally,” yang dapat diartikan “sehimpunan karakteristik psikologis seseorang yang mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan orang itu untuk berfungsi secara moral.” Diungkapkan lebih sederhana, karakter terdiri atas karakteristik-karakteristik yang mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang benar atau untuk tidak melakukan sesuatu yang benar itu. Ini berperan sebagai definisi global karakter. Namun demikian, tentu saja, selanjutnya masih harus didefinisikan karakteristik-karakteristik psikologis apa saja yang mempengaruhi kefungsian moral. Selanjutnya, Berkowitz juga menawarkan apa yang disebutnya *Moral Anatomy*.⁵ Dengan istilah “anatomi moral” dia merujuk pada komponen-komponen psikologis yang menyusun individu moral yang lengkap. Terdapat tujuh bagian dari anatomi moral: perilaku moral, nilai-nilai moral, kepribadian moral, emosi moral, penalaran moral, identitas moral, dan karakteristik-karakteristik fondasionalnya.

Tidak masalah apakah seseorang mengadopsi model karakter tertentu yang telah disebutkan di atas atau model lainnya (misalnya, model tripartit kognisi, afek, dan perilaku—kepala, hati, dan tangan—yang didukung oleh Character Education Partnership dan Lickona), pokok hal di sini yaitu bahwa karakter merupakan konsep psikologis yang kompleks.⁶ Karakter menyimpulkan kapasitas untuk berpikir tentang benar dan salah, mengalami emosi-emosi moral (perasaan bersalah, empati, kepedulian), ikut serta dalam perilaku-perilaku moral (berbagi, memberi derma, mengatakan kebenaran, dsb.), meyakini kebaikan-kebaikan moral, menampilkan kecenderungan yang terus menerus untuk bertindak dengan kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan karakteristik-karakteristik lainnya yang mendukung kefungsian moral. Dengan cara pandang seperti demikian, karakter dapat didefinisikan sebagai suatu konstelasi yang kompleks dari dimensi-dimensi psikologis seseorang. Pemahaman tentang karakter dalam suatu cara yang bersifat psikologis, berdiferensiasi, dan komprehensif tampaknya akan memungkinkan kita untuk menyoroti bagaimana karakter berkembang dan apa yang dapat dilakukan untuk mengangkat atau memupuk perkembangannya.

Perkembangan Karakter Individu

Di dalam pokok hal perkembangan karakter, salah satu pertanyaan yang bersifat mendasar tetapi sukar untuk dijawab adalah kapan karakter mulai berkembang. Ini adalah sebuah pertanyaan menjebak yang penulis yakini pada dasarnya tidak dapat dijawab. Alasan untuk pandangan tersebut antara lain, pertama, karakter adalah fenomena yang memiliki banyak segi. Kedua, masing-masing dari komponen-komponen karakter memiliki lintasan perkembangannya sendiri. Ketiga, masing-masing orang berkembang dengan kecepatan berbeda. Keempat, urutan perkembangan dan profil komponen-komponen karakter adalah berbeda-beda untuk individu-individu yang berbeda. Terakhir, komponen-komponen karakter cenderung berkembang sedikit demi sedikit, atau dalam tahap-tahap pada suatu periode waktu yang panjang.

Dengan memperhatikan perspektif di atas, maka dapat kita pandang bahwa karakter mulai berkembang saat seseorang dilahirkan atau bahkan sebelumnya. Karena terdapat evidensi pengaruh-pengaruh genetik terhadap karakter, maka kita dapat secara masuk akal mengargumentasikan perkembangan karakter pra-kelahiran. Terdapat juga pandangan bahwa orang tua mulai terikat secara emosional dengan anaknya bahkan sebelum kelahiran, dan kita

⁵ Lihat M. W. Berkowitz, 1997.

⁶ Lihat Lickona, 1991.

mengetahui bahwa ikatan di antara orang tua dan anak merupakan sebuah faktor kritis dalam perkembangan karakter.

Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter di Indonesia

Berdasarkan pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun oleh tim penulis naskah dari Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (2010), pada prinsipnya pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip tersebut, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Prinsip-prinsip berikut ini digunakan dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (singkatnya, pendidikan karakter) di Indonesia:

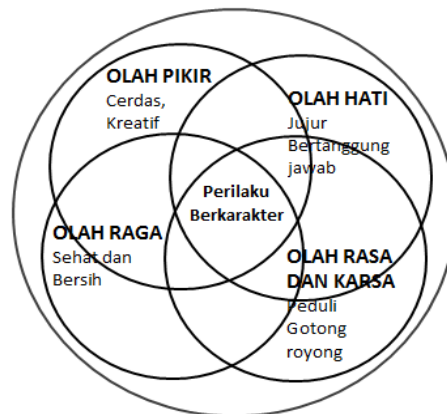
1. Berkelanjutan;
2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah;
3. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar;
4. Proses pendidikan dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Selain prinsip-prinsip di atas telah dirumuskan juga tujuan-tujuan dari pendidikan budaya dan karakter bangsa, sebagai berikut:

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
2. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan
5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Selanjutnya, di dalam dokumen tersebut ditegaskan pula pandangan bahwa perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga dan Kinestetik, dan Olah Rasa dan Karsa. Keempat proses psikososial ini secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur. Secara diagramatik,

koherensi keempat proses psikososial tersebut dapat digambarkan menggunakan diagram Venn sebagai berikut.



Gambar 1. Koherensi Karakter dalam Konteks Totalitas Proses Psikososial
(Diadaptasi dari Desain Induk Pendidikan Karakter Kemdiknas, 2010)

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa Pendidikan karakter di Indonesia mempercayai adanya ‘moral absolute’, yakni bahwa *moral absolute* perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang baik dan benar. Selain itu, pendidikan karakter kurang sepaham dengan cara pendidikan *moral reasoning* dan *value clarification* yang digunakan sebagai strategi dasar pendidikan karakter di Amerika Serikat, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal bersifat absolut yang bersumber dari agama-agama, disebut *the golden rule*. Misalnya, berbuat hormat, jujur, bersahaja, menolong orang, adil dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan karakter di Indonesia mempunyai makna lebih tinggi daripada pendidikan moral, karena ia bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (domain perilaku).

Trend Pendidikan Karakter di Amerika Serikat

Pendidikan karakter di Indonesia tampaknya tidak lepas dari pengaruh sejumlah program pendidikan karakter yang telah lebih dahulu digagas dan diprogramkan di negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat. Program pendidikan karakter yang terkemuka di Amerika Serikat antara lain adalah Character Counts yang mengangkat “The Six Pillars of Character” dan Character Education Partnership yang mengangkat “Eleven Principles of Effective Character Education” dan “Character Education Quality Standards.”

Namun demikian, terdapat kenyataan bahwa bidang pendidikan karakter selama ini penuh dengan kontroversi teoretis dan filosofis. Ini terutama terkait definisi karakter itu sendiri, fokus dari pendidikan karakter, dan beragam pendekatan untuk implementasinya. Misalnya, sebagai refleksi kemelut tersebut, Michael Davis (2003) dalam artikelnya “What’s Wrong with Character Education”⁷ merangkumkan program-program pendidikan karakter yang dominan di Amerika Serikat ke dalam: 1) pendidikan moral sederhana (esensinya,

⁷ M. Davis, “What’s Wrong with Character Education” dalam *American Journal of Education*, Vol. 110, No. 1 (The University of Chicago, 2003): 32-57.

pendidikan moral Kohlbergian⁸ di dalam kelas), di mana para siswa belajar bagaimana berpikir melalui situasi-situasi moral untuk dapat tiba pada pertimbangan atau keputusan moral terbaik dari suatu situasi; (2) pendidikan moral *just-community* (suatu praktek pendidikan karakter berdasarkan pandangan Dewey yang menekankan pengambilan keputusan demokratis di luar kelas), di mana para siswa diundang untuk ikut serta dalam proses demokrasi untuk mendiskusikan semua aspek kehidupan sekolah; dan, (3) pendidikan karakter sederhana (mencoba untuk membangun karakter baik di dalam maupun di luar kelas dengan menekankan perilaku yang baik), di mana nilai-nilai tertentu telah ditetapkan sejak awal dan para siswa diminta untuk mempraktekannya secara berulang-ulang.

Dalam artikel tersebut, Davis menyatakan bahwa pendidikan moral sederhana hanya memiliki efek kecil pada karakter, dan bahwa *just-community* tidak memiliki efek lebih besar, dibanding pendidikan moral sederhana, meski memiliki resiko dan biaya jauh lebih tinggi. Senada demikian, jenis pendidikan karakter yang paling dominan yaitu pendidikan karakter sederhana dipandang oleh Davis memiliki tiga kelemahan yang mengarahkan kita untuk menolaknya: kelemahan dari segi empirik (tidak adanya bukti bahwa pendidikan karakter jenis ini memang melakukan apa yang diklaimnya), kelemahan dari segi konseptual (konflik antara apa yang dimaksud karakter yang baik dan cara yang pendidikan karakter sederhana usulkan untuk mengajarkannya), dan kelemahan dari segi moral (kegagalan untuk melakukan hal-hal yang benar untuk alasan-alasan yang benar).

Kritikan Davis berangkat dari posisi bahwa pendidikan karakter adalah sebarang upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan karakter siswa sedemikian hingga mereka lebih cenderung untuk melakukan apa yang sepantasnya dilakukan—bukan hanya saat ini tetapi dalam rentang waktu panjang di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi yang diyakininya, efek-efek jangka pendek bukan bagian dari karakter, dan karakter merupakan “disposisi yang tertanamkan.”

Secara umum, Davis (2003) melihat bahwa kebanyakan program pendidikan karakter memperlakukan pendidikan karakter layaknya pendidikan yang bersifat fisik, dalam arti bahwa semakin seseorang mengulang kata-kata terkait karakter, maka semakin mungkin seseorang itu menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan penggunaan istilah “moral calisthenics,” yang “meliputi antara lain menyimak cerita-cerita tertentu, mengulang kata-kata tertentu, melakukan sekian pengabdian kepada masyarakat yang disyaratkan, atau mematuhi aturan-aturan tertentu” untuk mendeskripsikan pendidikan karakter seperti itu, Davis mengkritik bahwa kita tidak dapat memaksa siswa untuk menginternalisasikan karakter yang baik melalui perulangan. Namun demikian, meski tidak ada evidensi yang kuat mendukung pendidikan karakter sederhana, pendidikan karakter seperti demikian terus berkembang digunakan di Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat kritikan-kritikan lain mengenai hal bahwa pendidikan karakter di Amerika Serikat bersifat mengurangi motivasi intrinsik, fokus pada perilaku bukan pada perkembangan moral sebenarnya, kegagalan menyoroti realitas sosioekonomi, kurangnya asesmen, kurangnya penyiapan guru, serta banyak argumen lain yang menempatkan keraguan kuat pada gerakan pendidikan karakter secara keseluruhan (Noll, 2006; Burke, et al., 2001; Rossides, 2004).

Namun demikian, pihak lain, misalnya Character Education Partnership (2005)⁹, mengemukakan klaim sebaliknya bahwa terdapat banyak program pendidikan karakter yang

⁸ L. Kohlberg, *The Psychology of Moral Development, Essays on Moral Development, Vol. 2* (New York: Harper and Row, 1984).

⁹ M.W. Berkowitz, et al., *What Works in Character Education: A research driven guide for educators* (Character Education Partnership, 2005).

efektif mengangkat perkembangan karakter dalam diri siswa. Selain itu, Battistich¹⁰ merangkumkan sekumpulan evidensi bahwa pendidikan karakter yang berkualitas tidak saja efektif untuk mengangkat perkembangan karakter yang baik, tetapi juga merupakan pendekatan pencegahan yang menjanjikan bagi berbagai masalah dewasa ini seperti perilaku agresif dan antisosial, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku seksual bawah umur, tindak kejahatan, prestasi akademik yang buruk, dan kegagalan dalam persekolahan.

B. TANTANGAN DAN ISU-ISU GLOBAL TERKINI

Masyarakat tradisional di masa lalu menekankan pada pertanian. Mereka biasanya memproduksi hanya sedikit lebih daripada yang dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga, dan saat ada hasil lebih, mereka saling tukar atau mendagangkannya, atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan keagamaan. Umumnya, masyarakat sebelum era globalisasi hidup selaras dengan alam. Mereka menjadikan agama sebagai kendali jiwa, dan menghormati orang yang lebih tua dan tokoh masyarakat. Orang-orang di masyarakat saling menghargai tidak berdasarkan uang atau materi dan hidup dengan damai. Manusia hidup seimbang dengan alam, bukan mendominasi alam. Manusia yang satu menghormati dan menghargai manusia lainnya berdasarkan prinsip bahwa setiap orang adalah berharga sebagai manusia.

Namun demikian, kapitalisme dan lebih kini globalisasi sudah membuat perubahan besar dalam masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang memiliki pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan pada akhirnya mengeksploitasi alam mereka, mengambil atau memproduksi dengan mesin-mesin berteknologi tinggi hingga merusak sumber daya alam itu sendiri. Bahkan, hidup dengan cara yang sederhana dan bersahaja saat ini dipandang oleh banyak orang sebagai terbelakang dan hidup dalam kemiskinan.

Dunia saat ini mengalami perubahan sangat cepat dan dengan intensitas yang seringkali tampak tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan global terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perubahan Iklim dan sekaligus mengimbangi perubahan cepat dalam masyarakat dan perekonomian, maka diperlukan perubahan yang sistemik.

Abad ke-21 akan menjadi abad kota-kota. Populasi perkotaan di dunia diperkirakan akan meningkat dari 7,3 miliar pada tahun 2015 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Proses urbanisasi ini berpengaruh besar pada banyak hal seperti kualitas kehidupan, konsumsi sumber daya dan energi di tingkat global, pada lingkungan dan air, serta pada transportasi orang dan barang. Momentum urbanisasi ini dan dampaknya sangatlah besar sehingga tidak ada pilihan lain bahwa kita harus mengatasi perubahan cepat ini.

Berdasarkan dokumen International Scan 2016, *Emerging Issues in An International Context November 2016*, terdapat enam isu besar yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Iklim dan energi; (3) Lingkungan dan air; (4) Pangan dan pertanian; (5) 'Green economy'; dan, (6) Transportasi dan mobilitas. Perkara terkait pangan dan pertanian, misalnya, bahwa pada tahun 2050 produksi makanan global akan perlu meningkat 60% untuk menghidupi lebih dari sembilan miliar orang yang diperkirakan akan mengisi planet ini. Sebagian besar dari mereka akan hidup di lingkungan perkotaan. Namun demikian, sumber daya alam saat ini semakin memburuk; berbagai ekosistem berada dalam

¹⁰ Victor Battistich, *Character Education, Prevention, and Positive Youth Development*, (University of Missouri, St. Louis. Character Education Partnership. Website.)

tekanan dan keragaman hayati mengalami kepunahan di berbagai penjuru dunia. Perubahan iklim mengedepankan satu ancaman lain terhadap produksi pangan dunia.

Satu dokumen lain, *The Global Risks Report 2016* dari World Economic Forum mencantumkan dua kelompok resiko global berdasarkan urutan seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Resiko Berdasarkan “Kemungkinan”	Resiko Berdasarkan “Dampak”
<ol style="list-style-type: none"> 1. Migrasi terpaksa skala-besar 2. Peristiwa cuaca ekstrim 3. Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan cuaca 4. Konflik antar negara 5. Bencana alam besar 6. Kegagalan pemerintahan nasional 7. Ketidakterediaan atau kekurangan lapangan kerja 8. Penipuan atau pencurian data 9. Krisis air 10. Perdagangan ilegal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Senjata pemusnah massal 3. Krisis air 4. Migrasi terpaksa skala-besar 5. Kejutan harga energi 6. Kepunahan keragaman hayati dan kerusakan ekosistem 7. Krisis fiskal 8. Penyebaran penyakit menular 9. Pembengkakan modal 10. Ketidakstabilan sosial yang mencolok

Sumber:

The Global Risks Report 2016, 11th Edition
World Economic Forum

Isu-isu global yang menarik lainnya antara lain dapat disimak dari dokumen *The Global Competitiveness Report 2016-2017* dari World Economic Forum. Dokumen ini menyajikan penilaian dan peringkat terhadap 138 negara berdasarkan 12 pilar kebersaingan global sebagai berikut: (1) institusi; (2) infrastruktur; (3) lingkungan makroekonomi; (4) kesehatan dan pendidikan dasar; (5) pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) efisiensi pasar barang; (7) efisiensi pasar tenaga kerja; (8) perkembangan pasar finansial; (9) kesiapan teknologi; (10) ukuran pasar; (11) sofistikasi bisnis; dan, (12) inovasi.

Selanjutnya, berikut ini sekilas gambaran tingkat kebersaingan global untuk Indonesia berdasarkan dokumen *Global Competitiveness Report 2016-2017* tersebut.

Indonesia (ke-41) turun empat peringkat karena diambil alih oleh beberapa negara lain. Meskipun telah dilakukan banyak reformasi pada lingkungan bisnisnya, kinerja Indonesia masih belum menunjukkan pemerataan hasil yang baik: Negara ini ada di peringkat ke-10 untuk ukuran pasar, ke-30 untuk pilar lingkungan makroekonomi, dan ke-31 dalam inovasi. Indonesia memiliki kinerja yang baik dalam hal perkembangan finansial (ke-42, naik tujuh). Tetapi Indonesia berperingkat rendah ke-100 dalam pilar kesehatan dan pilar pendidikan dasar (turun 20), dan ke-108 dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja (naik 7) sebagai akibat dari beragam kekakuan, ongkos pemborosan prohibitif yang besarnya lebih dari nilai setahun gaji (ke-133), dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang rendah (ke-115). Indonesia juga berperingkat rendah, ke-91, dalam pilar kesiapan teknologi (turun 6 peringkat) karena daya tembus ICT masih rendah—hanya seperlima dari populasinya

menggunakan Internet dan hanya ada satu koneksi broadband untuk setiap 100 orang. Namun demikian, penyerapan teknologi oleh perusahaan lebih meluas (ke-53).

Selain itu, dalam pilar pendidikan dan keterampilan ternyata Indonesia masih berada pada peringkat ke-77. Hal yang menarik, peringkat keterampilan angkatan kerja Indonesia saat ini berada di peringkat ke-81 sedangkan keterampilan angkatan kerja Indonesia di masa depan berada pada peringkat ke-69. Namun demikian, Indonesia berada pada peringkat ke-39 pada kualitas sistem pendidikan, ke-54 pada kualitas pendidikan dasar, tetapi ke-106 pada tingkat keikutsertaan pendidikan dasar. Selain itu, kualitas pendidikan matematika dan sains di Indonesia duduk pada peringkat ke-53.

C. BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Kebudayaan adalah “pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.” (Geertz, 1992:5). Terdapat tujuh elemen dari kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2009), yaitu: bahasa, sistem ilmu pengetahuan, agama, sistem mata pencaharian, kesenian, organisasi sosial, dan sistem teknologi.

Kearifan lokal atau *local wisdom* dalam ilmu antropologi dikenal juga sebagai ‘local genius’. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian istilah local genius ini, antara lain Haryati Soebadio yang mengatakan bahwa local genius adalah juga ‘cultural identity’, atau identitas/kepribadian budaya bangsa yang menjadikan bangsa itu mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan diri mereka sendiri (Ayatrohaedi, 1986: 18-19).

Selain itu, Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986: 40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah berpotensi sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- mampu bertahan terhadap budaya luar,
- memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- mempunyai kemampuan mengendalikan,
- mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang layak untuk dijadikan pegangan hidup dari waktu ke waktu. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari suatu periode panjang yang berevolusi seiring masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami secara bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat ini dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber kekuatan dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Ilmuwan antropologi Koentjaraningrat (2009) telah mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada idea, aktivitas sosial, dan artifak.

D. POTENSI HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEARIFAN LOKAL

Lepas dari bagaimana dan kearifan lokal yang mana dimasukkan ke dalam pendidikan karakter, dengan mengingat keprihatinan bahwa memang telah terjadi banyak permasalahan lingkungan dan sosial di Indonesia, maka kehadiran unsur kearifan lokal dalam pendidikan karakter adalah hal yang baik untuk mengimbangi efek negatif dari kapitalisme dan globalisasi. Unsur kearifan lokal yang terdapat dalam pembelajaran (yaitu, dalam pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam proses pembelajaran dan kurikulum) diharapkan dapat membawa peserta didik pada pembelajaran yang dekat dengan jati diri mereka dan budaya mereka. Dengan kedekatan seperti itu, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berguna secara langsung bagi kehidupannya.

Selain itu, jika unsur kearifan lokal diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter, maka terdapat kemungkinan lebih besar bahwa kearifan lokal itu akan lestari karena ia terimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah yang kemudian diharapkan dapat tertanamkan dalam diri peserta didik dan terbawa oleh mereka ke dalam kehidupan di masyarakat. Namun demikian, dengan mengingat bahwa kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain, maka mungkin saja kearifan lokal dari suatu daerah tidak cukup berlaku bagi daerah lainnya.

Akhirnya, kita ingat kembali pandangan Lickona, “Pendidikan karakter adalah efektif jika ia membantu para peserta didik untuk memanfaatkan seluruh sumber daya intelektual dan kultural mereka, termasuk tradisi keyakinan mereka, saat mereka membuat keputusan-keputusan moral.”

REFERENSI

- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa. (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bell, E.T. (1986). *Men of Mathematics*. New York: Simon and Schuster.
- Berkowitz, M.W. (1997). “The Complete Moral Person: Anatomy and Formation” dalam J.M. Dubois, ed., *Moral Issues in Psychology: Personalist Contributions to Selected Problems*, 11-42. Lanham, Md.: University Press of America.
- (2002). “The Science of Character Education” dalam W. Damon, ed., *Bringing in a New Era in Character Education*, 43-63. Stanford, Cal.: Hoover Institution Press.
- Burke, Nancy, Cru, Sharon, Genzler, Mary, Shaub, Dee, & Sheets, Jayne. (2001). (ERIC Document Reproduction Service No. ED453144).
- Cockcroft, W.H. (1982). *Mathematics Counts: Report of the Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools.* London: Her Majesty’s Stationery Office.
- Davis, Michael. (2003). What’s wrong with character education. *American Journal of Education*, 110(1), 32-57.
- Isaacs, D. (2006). *Character Building*. Portland, OR: Four Courts Press.
- JIST. (2006) *Young Person’s Character Education Handbook*. St. Paul, MN: JIST Publishing
- Kemdiknas. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter Kementrian Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemdiknas.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kohlberg, L. (1984). *The Psychology of Moral Development, Essays on Moral Development, Vol. 2*. New York: Harper and Row.

- Lickona, T. (1991). *Educating for Character*. New York: Bantam.
- Lickona, T., Schaps, E., and Lewis, C. (1995). *Eleven principles of effective character education*. Washington, D.C.: Character Education Partnership.
- NCTM . (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Noll, J. W. (2006). *Taking sides: clashing views on controversial educational issues* (13th ed.). Guilford, CT: Dushkin/McGraw-Hill.
- Nucci, L. (2001). *Education in the Moral Domain*. New York: Praeger.
- Puskur. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.
- Rahyono. F.X. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- RLi. (2016). *International Scan 2016: Emerging Issues in An International Context*. The Hague: RLi.
- Rossides, Daniel W. (2004). Knee-jerk formalism: Reforming American education. *Journal of Higher Education*, 75(6), 667-704.
- Schwab, Klaus. (2016). *The Global Competitiveness Report 2016-2017*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2016). *The Global Risks Report 2016, 11th Ed*. Geneva: World Economic Forum.